

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan suatu bangsa dapat dipengaruhi dengan adanya pendidikan. Pendidikan berperan sangat penting dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan untuk menyejahterakan masyarakat. Melalui pendidikan yang baik dan tepat, akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk memajukan suatu bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, maka setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menempuh pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan isi pada pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.<sup>1</sup>

Pendidikan merupakan suatu tempat atau wadah bagi seseorang untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki. Sebagaimana tercatat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat (1), menjelaskan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”<sup>2</sup>

Berdasarkan pengertian pendidikan diatas, dapat diketahui bahwasanya pendidikan merupakan proses menyalurkan pengetahuan melalui pembelajaran, sehingga dapat diterima dan berjalan dengan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 31 ayat (1), <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1945/UUDTAHUN~1945UUD.HTM> diakses pada tanggal 26 Mei 2023.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (1), (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>) diakses pada tanggal 26 Mei 2023.

baik. Selain itu, dengan pendidikan diharapkan dapat membantu untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat dan mampu mengembangkan potensi diri yang dimiliki.

Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, adapun salah satu komponen pendidikan yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan tersebut, terdiri dari: pendidikan formal (sekolah), pendidikan informal (keluarga), dan pendidikan nonformal (masyarakat).<sup>3</sup> Sekolah merupakan salah satu lingkungan formal yang menyelenggarakan pendidikan. Sekolah juga merupakan suatu wadah atau tempat terjadinya pendidikan. Dalam hal ini, sekolah dapat diartikan sebagai lembaga pendidikan yang dapat menampung peserta didik dalam proses belajarnya, agar mereka memiliki kemampuan, kecerdasan, dan keterampilan melalui pengembangan potensi diri yang dimilikinya. Sekolah yang dijadikan tempat untuk menimba ilmu tersebut, juga merupakan suatu organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Organisasi pada umumnya mengalami beberapa penyesuaian untuk menghadapi perubahan zaman, maka sekolah harus mampu akan hal tersebut.

Adapun dalam penyelenggaraan pendidikan masih terdapat beberapa kesenjangan sehingga sekolah diharapkan dapat menyesuaikan kondisi untuk menghadapi tantangan dan perubahan tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024, yang menyatakan bahwa beberapa daerah di Indonesia masih mengalami kekurangan dalam memperoleh pendidikan atau terbatas layanannya.<sup>4</sup> Berbagai upaya dilakukan untuk

---

<sup>3</sup> Abdul Hakim Jurumiah dan Husen Saruji, "Sekolah sebagai Instrumen Konstruksi Sosial di Masyarakat", Vol. 7 (2), Jurnal ISTIQRA', 2020, h. 2.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024, Bab I poin (B).

memperluas akses dan pembenahan mutu penyelenggaraan pendidikan, tetapi belum membuahkan capaian yang memuaskan. Kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah masih menjadi isu penting dalam pemerataan mutu pendidikan di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki 34 provinsi dengan 514 kabupaten/kota yang kondisi sosial ekonomi dan geografis serta kapasitas kelembagaannya berbeda-beda, sehingga hal tersebut memengaruhi kemampuan daerah dalam menerapkan kebijakan pendidikan.<sup>5</sup> Menurut Rosser yang dikutip oleh Zamjani, dkk., menyebutkan bahwa selain masalah ekonomi dan politik yang terjadi antardaerah, hal tersebut juga disebabkan munculnya masalah pendanaan yang belum memadai, defisit sumber daya manusia antardaerah, kekeliruan dalam struktur insentif, serta manajemen pengelolaan yang belum memadai.<sup>6</sup>

Selain itu, dilihat dari sisi capaian hasil belajar yang berasal dari hasil Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) untuk mengukur kemampuan matematika, membaca, dan sains siswa Indonesia. Pengelompokan nilai AKSI dilakukan berdasarkan pulau-pulau di Indonesia. Dari pengelompokan nilai tersebut, diketahui bahwa adanya ketimpangan kualitas pendidikan secara geografis. Menurut pusat penilaian pendidikan, menyatakan bahwa dalam nilai AKSI pulau-pulau di timur Indonesia seperti Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara menunjukkan adanya kesenjangan yang tinggi dibandingkan dengan DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta.<sup>7</sup>

Dengan adanya ketimpangan ataupun potret mutu pendidikan di Indonesia yang belum meningkat lebih baik, membuat pemerintah meluncurkan berbagai program dan kebijakan di tingkat nasional. Untuk memberikan dampak yang lebih luas dan merata pada lebih banyak sekolah dan daerah, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan serta meresmikan Program Sekolah

---

<sup>5</sup> Irsyad Zamjani, dkk., *Naskah Program Sekolah Penggerak* (Pusat Penelitian Kebijakan (Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), h. 4.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

Penggerak.<sup>8</sup> Pada bulan Februari 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluncurkan program sekolah penggerak sebagai upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Dengan adanya sekolah penggerak diharapkan dapat menjadi harapan bagi sekolah yang belum mengalami peningkatan mutu. Sekolah tersebut dapat berkonsultasi ataupun mendapat pendampingan dari sekolah yang telah bergabung lebih awal dalam program sekolah penggerak.

Program sekolah penggerak merupakan suatu alat atau katalis yang digunakan untuk mempercepat perwujudan visi pendidikan nasional, yang berfokus pada pengembangan hasil belajar peserta didik secara holistik mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) serta karakter. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak, menyatakan bahwa program ini mendorong sekolah baik itu negeri maupun swasta agar melakukan transformasi diri dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, yang kemudian akan melakukan pengimbasan pada sekolah lain agar mereka melakukan peningkatan mutu serupa. Dengan adanya program sekolah penggerak akan membawa perubahan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia.<sup>9</sup>

Adapun tujuan dari program sekolah penggerak yaitu: untuk meningkatkan kompetensi dan karakter agar sesuai dengan profil pelajar pancasila, menjamin pemerataan kualitas pendidikan, membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat dengan berfokus pada peningkatan kualitas, dan menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan.<sup>10</sup> Penyelenggaraan program sekolah penggerak diawali dengan mensosialisaikan program

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 6.

<sup>9</sup> Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak, Bab I Poin (A), h. 2. ([https://jdih.kemdikbud.go.id/detail\\_peraturan?main=3006](https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=3006)) diakses pada tanggal 28 Mei 2023.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Bab I Poin B.

sekolah penggerak, menetapkan provinsi/kabupaten/kota sebagai penyelenggara program sekolah penggerak, menetapkan satuan pendidikan, melaksanakan kegiatan program sekolah penggerak pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, melaksanakan kegiatan program sekolah penggerak pada satuan pendidikan, mengevaluasi penyelenggaraan program sekolah penggerak.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah tidak akan luput dari adanya peran kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah berperan sangat penting dalam proses penerapan program sekolah penggerak dan dalam rangka mencapai tujuan dari program tersebut. Seorang pemimpin disebut juga sebagai agen perubahan yang dapat memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Menurut Sowiyah, kepala sekolah merupakan seorang guru yang memiliki kemampuan untuk memimpin segala sumber daya sekolah, sehingga dapat didayagunakan secara maksimal dalam proses pencapaian tujuan bersama.<sup>12</sup>

Sedangkan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, yaitu pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan Pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, atau sekolah Indonesia di Luar Negeri”.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, Bab II

<sup>12</sup> Sowiyah, *Kepemimpinan Kepala Sekolah* (Yogyakarta: Media Akademi, 2016), h. 14.

<sup>13</sup> Permendikbud Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, Pasal 1 ayat (1), ([https://jdih.kemdikbud.go.id/detail\\_peraturan?main=2940](https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=2940)) diakses pada tanggal 26 Mei 2023.

Kepemimpinan kepala sekolah sangat memengaruhi keberlangsungan pendidikan di sekolah. Hal tersebut sejalan dengan pengertian dari kepemimpinan itu sendiri, yang dimana kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam memberikan bimbingan, pengarahan, pengaruh, dan inspirasi bagi orang lain dalam suatu kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya kepemimpinan kepala sekolah, maka setiap pelaksanaan yang berjalan akan terkoordinir dengan efektif.

Kepala sekolah sebagai pemimpin, tentunya bukan hanya memerintah guru dan karyawannya untuk bekerja, tetapi kepala sekolah akan menjadi sosok yang dapat memberikan pengaruh, dorongan, dukungan, dan arahan agar mereka dapat melaksanakan tugas dan perannya secara optimal. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif merupakan kemampuan kepala sekolah dalam memberdayakan potensi yang dimiliki oleh seluruh warga sekolahnya secara optimal, sehingga mereka akan merasa diikutsertakan dalam pencapaian tujuan.<sup>14</sup>

Dalam menjalankan kepemimpinannya, kepala sekolah akan selalu mengalami adanya perubahan dan perkembangan organisasi. Sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya sebuah organisasi akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan agar organisasi tersebut selalu bersifat dinamis atau terbuka dalam menghadapi kemajuan maupun perkembangan zaman. Adanya perubahan dan perkembangan di lingkungan masyarakat menuntut organisasi untuk selalu menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Saat ini, sekolah harus mampu membuat perubahan dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Sama halnya dengan organisasi lainnya, perubahan di sekolah didefinisikan sebagai perubahan, perbaikan, restrukturisasi, atau penyesuaian dalam proses pendidikan di sekolah. Agar sekolah mampu beradaptasi dan mencapai mutu yang diharapkan, maka

---

<sup>14</sup> Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, *Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 164.

sekolah perlu menyusun strategi perubahan, pendekatan manajemen, dan gaya kepemimpinan.<sup>15</sup>

Perubahan kebijakan pendidikan melalui program sekolah penggerak, berimplikasi juga terhadap kepemimpinan kepala sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah akan lebih meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam mengelola sekolah, lebih menekankan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, dapat menginspirasi dan memotivasi untuk berkomitmen terhadap perubahan, serta kepala sekolah harus memiliki pemahaman terkait perubahan yang terjadi sehingga dapat mensosialisasikan perubahan tersebut. Dengan adanya perubahan tersebut, menuntut seorang pemimpin yang transformatif. Sehingga, gaya kepemimpinan tersebut mengarah kepada kepemimpinan transformasional.

Gaya kepemimpinan transformasional merupakan salah satu gaya kepemimpinan yang mengedepankan pemberdayaan sumber daya manusia di organisasinya dalam menghadapi perubahan. Gaya kepemimpinan dapat dikatakan ideal apabila gaya kepemimpinan tersebut memiliki penekanan dalam menyatakan visi misi dengan jelas, dapat membangun komunikasi secara efektif, mampu memberikan rangsangan secara intelektual, dan memberikan perhatian pribadi terhadap persoalan yang dihadapi oleh warga sekolahnya.<sup>16</sup> Hal tersebut dapat diterapkan dengan gaya kepemimpinan transformasional, karena sejalan dengan dimensi dari kepemimpinan transformasional itu sendiri. Menurut Cavazotte, kepemimpinan transformasional berhubungan dengan tingkat kinerja dan kemampuan

---

<sup>15</sup> Windasari, Erny Roesminingsih, dan Syunu Trihantoyo, "Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah terhadap Perubahan Organisasi Sekolah Dasar", Vol. 9 (1), Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan, 2022, h. 100.

<sup>16</sup> Mei Hardika Senny, dkk., "Penerapan Gaya Kepemimpinan Transformasional dalam Manajmen PAUD di Kecamatan Sidorejo Salatiga", Vol. 8 (2), Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 2018, h. 198.

pemimpin dalam membantu guru maupun karyawannya untuk melaksanakan peran dan tugas mereka.<sup>17</sup>

Adapun dimensi dari kepemimpinan transformasional tersebut, yaitu terdiri dari pengaruh ideal (*Idealized Influence*) yang mengacu pada kemampuan kepala sekolah untuk menjadi contoh atau teladan bagi para warga sekolahnya dalam melaksanakan tugas sehingga dapat diakui maupun dipercaya oleh mereka, Motivasi Inspirasional (*Inspirational Motivation*) mengacu pada kemampuan kepala sekolah dalam memberi inspirasi dan motivasi pada warga sekolahnya, Stimulasi Intelektual (*Intellectual Stimulation*) mengacu pada upaya kepala sekolah agar para pendidik dan tenaga kependidikannya mampu mencetuskan ide-ide atau kreativitasnya dalam pemecahan suatu persoalan maupun dalam melaksanakan tugasnya, dan Pertimbangan Individual (*Individualized Consideration*) yang mengacu pada upaya secara terus menerus oleh kepala sekolah dalam memimpin agar dapat memperlakukan warga sekolahnya tanpa diskriminasi serta bertindak sebagai mentor dalam pengembangan potensi diri pendidik maupun karyawannya.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di salah satu sekolah menengah atas (SMA) swasta yang sudah terdaftar sebagai pelaksana program sekolah penggerak angkatan 1 (pertama) pada tahun 2021. Sekolah menengah atas (SMA) swasta tersebut yaitu SMA PKP DKI Jakarta. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan ketertarikan peneliti terhadap penerapan kepemimpinan transformasional kepala sekolah SMA PKP DKI Jakarta dalam pengimplementasian program sekolah penggerak. Wujud dari penerapan kepemimpinan transformasional kepala sekolah terlihat dari kedisiplinannya, baik itu berkaitan dengan waktu maupun pakaian yang digunakan. Kepala sekolah senantiasa menjadi teladan dengan ikut serta dalam segala kegiatan sekolah. Untuk meningkatkan potensi

---

<sup>17</sup> Kiki Rizki Amalia Putri, dkk., "Implementasi Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 89 Jakarta", Vol. 1 (1), Jurnal Pendidikan Intelektium, 2020, h. 2.

yang dimiliki oleh tenaga pendidik dan kependidikannya, kepala sekolah turut mendorong mereka untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Selain itu, setiap perubahan yang terjadi di sekolah akan kepala sekolah sosialisasikan terlebih dahulu kepada warga sekolahnya sehingga dalam melaksanakan pekerjaan dapat menumbuhkan rasa percaya diri mereka masing-masing. Lalu, sejalan dengan salah satu intervensi sekolah penggerak yaitu digitalisasi sekolah, maka SMA PKP ini berinovasi untuk menerapkan sistem absensi digital. Wujud dari sistem absensi digital ini menggunakan *barcode* yang dicantumkan dalam tanda pengenal tenaga pendidik dan kependidikan serta peserta didik. Sehingga daftar hadir tersebut dapat tercatat secara *realtime* atau sesuai waktu saat menempelkan tanda pengenal masing-masing.

Sekolah menengah atas (SMA) PKP DKI Jakarta ini merupakan sekolah swasta yang berada dalam naungan Yayasan PKP DKI Jakarta dan didirikan pada tahun 1988. PKP sendiri merupakan singkatan dari Pondok Karya Pembangunan. Dalam lingkungan PKP terdapat dua lembaga pendidikan yaitu umum dan madrasah yang berada dalam satu lokasi. SMA PKP DKI Jakarta ini sudah terakreditasi A.<sup>18</sup> SMA PKP DKI Jakarta ini menerapkan sistem pembinaan pendidikan yang berbasis kepemimpinan serta memiliki guru yang berkualifikasi lulusan S1, S2, hingga S3. Saat ini, SMA PKP DKI Jakarta dipimpin oleh Ummi Atiyah yang menjabat pada awal tahun 2021 yang dimana setelah 3 (tiga) bulan menjabat, kepala sekolah mengikuti seleksi untuk menjadikan SMA PKP sebagai salah satu sekolah yang melaksanakan program sekolah penggerak.<sup>19</sup>

Untuk menjadikan SMA PKP DKI Jakarta sebagai sekolah penyelenggara program sekolah penggerak, kepala sekolah mengikuti berbagai rangkaian seleksi mulai dari seleksi umum atau administrasi.

---

<sup>18</sup> Admin SMA PKP JIS, "Profil Sekolah: Sejarah singkat dan Keunggulan", <https://www.smapkpjis.sch.id/profil/profil-sekolah/> (diakses pada tanggal 1 Juni 2023, pukul 8:53 WIB).

<sup>19</sup> Hasil informasi dengan Kepala Sekolah, pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023, pukul 08:47 WIB.

Setelah dinyatakan lolos seleksi umum tersebut, kepala sekolah mengikuti test skolastik atau test potensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan bernalar dan pemecahan masalah. Seleksi selanjutnya yang diikuti oleh kepala sekolah yaitu wawancara dan test *peer teaching* yang keseluruhannya dilaksanakan secara *online*. Setelah dinyatakan lolos, kepala sekolah mengikuti pelatihan secara kontinu selama satu tahun. Setelah dinyatakan sebagai sekolah pelaksana program sekolah penggerak, kepala sekolah akan memilih beberapa guru di kelas sepuluh sebagai komite pembelajaran dan diikutsertakan dalam pelatihan secara *online*.

Alasan kepala SMA PKP DKI Jakarta menjadikan sekolah tersebut sebagai penyelenggara program sekolah penggerak yaitu dikarenakan adanya intervensi-intervensi khusus dari pemerintah dan dikarenakan kondisi pasca pandemic *covid-19* yang mendorong kepala sekolah untuk meningkatkan mutu serta melakukan perubahan sekolah yang lebih baik lagi. Dengan melaksanakan program sekolah penggerak diharapkan sekolah akan menerima pendampingan dari Kemendikbud untuk menjalankan perubahan-perubahan di sekolah yang sesuai dengan tujuan dari program sekolah penggerak. Perbedaan pada kondisi awal maupun saat ini yaitu terlihat bahwa sekolah yang telah menyelenggarakan program sekolah penggerak akan melaksanakan kurikulum merdeka, sedangkan dahulu sekolah masih menggunakan kurikulum 2013.

Setelah melaksanakan program sekolah penggerak, kepala sekolah melakukan beberapa pembaharuan diantaranya yaitu merubah sistem sekolah yang lebih *modern* terkait dengan kebijakan digitalisasi. Kebijakan digitalisasi tersebut terwujud dalam bentuk absensi baik itu pegawai maupun peserta didik sudah melakukan absensi secara digital dengan menggunakan *barcode* yang tertera dalam kartu pegawai atau kartu pelajarinya. Hal tersebut tentu berbeda pada penyelenggaraan sekolah yang dulu dengan sekarang, yang dulu masih menggunakan sistem absensi manual sedangkan sekarang

sudah menerapkan absensi digital. Selain itu, perubahan yang terjadi yaitu dengan adanya peningkatan dalam Sistem Manajemen Sekolah (SIM).

Pada proses pembelajaran juga terjadi perubahan, yaitu dengan adanya pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga peserta didik akan belajar sesuai bakat dan minatnya. Untuk melihat bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik, sekolah telah bekerja sama dengan lembaga psikolog yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan pembelajaran di kelas. Adapun pelaksanaan P5 (proyek penguatan profil pelajar pancasila) yang disesuaikan dengan karakter atau kondisi sekolah, bakat dan minat peserta didik, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Hambatan dalam pelaksanaan program sekolah penggerak tersebut yaitu adanya tantangan untuk merubah *mindset* warga sekolah yang membutuhkan waktu.

Sebagai sekolah menengah atas yang menyelenggarakan program sekolah penggerak, sekolah yang berbasiskan islam, dan sekolah berbasis kepemimpinan. Kepala sekolah, ibu Ummi Atiyah mengharapkan agar SMA PKP menjadi sekolah penggerak yang memiliki nuansa Islamic yang kental, karena hal tersebut berkaitan dengan penguatan profil pelajar pancasila yang sejalan dengan sila pertama pancasila yaitu “ketuhanan yang maha Esa”.<sup>20</sup> Dalam hal ini, OSIS akan berperan sebagai contoh bagi peserta didik lainnya. Selain itu, untuk meningkatkan kolaborasi antar warga sekolah, maka kepala sekolah menyosialisasikan dan memotivasi penerapan program sekolah penggerak kepada warga sekolah lainnya. Dalam hal melakukan pengimbasan pada sekolah di sekitarnya, kepala sekolah kerap kali ditunjuk sebagai fasilitator untuk menyosialisasikan program sekolah penggerak maupun implementasi kurikulum merdeka.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait kepemimpinan transformasional kepala sekolah, tetapi lebih banyak

---

<sup>20</sup> Hasil informasi dengan Kepala Sekolah, pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023, pukul 09:02 WIB.

membahas peran dari kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja pegawai hingga meningkatkan mutu sekolah. Masih jarang ditemukan pembahasan gaya kepemimpinan transformasional dalam rangka implementasi program sekolah penggerak. Hal tersebut dikarenakan program sekolah penggerak baru diterapkan pada tahun 2021.

Berdasarkan uraian diatas, menimbulkan rasa ingin tahu peneliti untuk mengkaji lebih mendalam terkait **“Kepemimpinan Transformasional dalam Implementasi Program Sekolah Penggerak di SMA Pondok Karya Pembangunan (PKP) DKI Jakarta”**.

### **B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada **“Kepemimpinan Transformasional dalam Implementasi Program Sekolah Penggerak di SMA Pondok Karya Pembangunan (PKP) DKI Jakarta”**. Sedangkan, untuk sub fokus dari penelitian ini yaitu:

1. Motivasi Inspirasional (*Inspirational Motivation*) kepala sekolah dalam implementasi program sekolah penggerak.
2. Stimulasi Intelektual (*Intellectual Stimulation*) kepala sekolah dalam implementasi program sekolah penggerak.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian yang telah diuraikan diatas, adapun beberapa pertanyaan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Bagaimana kepala sekolah menerapkan motivasi inspirasionalnya (*inspirational motivation*) dalam implementasi program sekolah penggerak di SMA PKP DKI Jakarta?

2. Bagaimana kepala sekolah menerapkan stimulasi intelektualnya (*intellectual stimulation*) dalam implementasi program sekolah penggerak di SMA PKP DKI Jakarta?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum dari penelitian ini diantaranya yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

1. Penerapan motivasi inspirasional (*inspirational motivation*) kepala sekolah SMA PKP DKI Jakarta dalam implementasi program sekolah penggerak.
2. Penerapan stimulasi intelektual (*intellectual stimulation*) kepala sekolah SMA PKP DKI Jakarta dalam implementasi program sekolah penggerak.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan bermanfaat sebagai sumber informasi maupun wawasan terkait kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam implementasi program sekolah penggerak.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Lembaga Pendidikan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan yang membangun dan memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dalam implementasi program sekolah penggerak. Selain itu, diharapkan juga dapat bermanfaat sebagai bahan informasi terkait kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam

implementasi program sekolah penggerak di SMA PKP DKI Jakarta.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan referensi dan pengetahuan terkait kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam implementasi program sekolah penggerak. Selain itu, diharapkan juga dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dasar bagi penelitian selanjutnya.

c. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti. Selain itu, diharapkan dapat menambah pengalaman peneliti setelah melaksanakan pengamatan serta penelitian secara langsung terkait kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam implementasi program sekolah penggerak di SMA PKP DKI Jakarta.

